



Buletin

# Parlementaria

Nomor 992/IV/I/2018 • Januari 2018

**Semua Fraksi DPR  
Tidak Setuju LGBT**

**KPK Jangan Serakah  
Urusi Korupsi Sektor Swasta**



**DPR PANTAU VENUE  
ASIAN GAMES  
2018**

**TIDAK  
DIPERJUAL  
BELIKAN**



9 772614 339005

# DPR Pantau Venue Asian Games 2018

Asian Games 2018 dilaksanakan pada 18 Agustus 2018 mendatang, di dua provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Selatan, serta melibatkan Provinsi Banten dan Jawa Barat. Untuk mengetahui seluruh persiapan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, Komisi X DPR RI menyambangi Komplek Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Rabu (24/1), yang menjadi salah satu venue tempat berlangsungnya Asian Games 2018.



Tim Komisi X DPR RI meninjau sarana dan prasarana persiapan Asian Games 2018 di Senayan, Jakarta

“Kami bermaksud untuk melakukan komunikasi dengan Direksi Pengelolaan Komplek GBK untuk mendapatkan masukan berupa data faktual atas persiapan, kesiapan dan kendala GBK dalam melakukan persiapan Asian Games 2018. Khususnya dalam hal tertib administrasi, transparansi keuangan, infrastruktur venue, serta Sumber Daya Manusia penyelenggaraan Asian Games 2018,” ucap Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto.

Ada beberapa hal pokok yang ingin diketahui dari kunjungan tersebut, lanjut Djoko, antara lain adalah sejauh mana koordinasi dengan pemerintah, seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, KOI, INASGOC, dan PPK GBK terkait dengan persiapan venue olahraga yang diadakan di GBK.

Politisi Partai Demokrat itu

menyampaikan, Asian Games 2018 mengusung 4 sukses, yaitu sukses administrasi penyelenggaraan, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses pemberdayaan ekonomi. Untuk mencapai 4 sukses itu, diperlukan pengawasan dari Komisi X DPR.

“Seperti terkait sukses administrasi penyelenggaraan, kami menginginkan agar mulai dari kepanitiaan, rencana induk, pendampingan terhadap administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tata kelola keuangan negara dan mekanisme pengadaan barang dan jasa,” tandas Djoko.

Terkait sukses penyelenggaraan, Komisi X akan mengawasi kinerja pemerintah, Pemda DKI Jakarta dan Sumatera Selatan, KOI, INASGOC,

terhadap persiapan venue, wisma atlet, acara pendukung, dan lain sebagainya. Terutama dalam aspek kebijakan maupun anggaran yang direncanakan.

“Untuk sukses prestasi, kami mengawasi sinergitas para pemangku kepentingan Asian Games 2018 baik dari pemerintah, KONI, KOI, PB Cabor, untuk dapat mencapai target yang direncanakan, yaitu masuk peringkat 7 besar dari 45 negara peserta. Dengan target perolehan 10 sampai 13 medali emas,” jelasnya.

Sementara terkait sukses pemberdayaan ekonomi, lanjut politisi asal dapil Jawa Tengah itu, pihaknya juga memantau kesiapan masyarakat, khususnya kesiapan masyarakat pelaku usaha di dua kota penyelenggara Asian Games 2018 dalam memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan Asian Games 2018 itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menekankan, venue-venue cabang olahraga yang ditargetkan dapat menyumbang medali emas bagi Indonesia, harus memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik. Oleh karenanya, venue tersebut harus menjadi prioritas utama yang dikerjakan.

“Semangatnya, kita ingin venue-venue cabang olahraga yang ditargetkan dapat menyumbang medali harus memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik. Dengan demikian tidak akan mengganggu terhadap target perolehan medali emas Indonesia. Sedari awal, Komisi X DPR sangat mendorong dan sekaligus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Asian Games 2018 agar dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ucap politisi F-Gerindra itu.

Sutan mengingatkan agar setiap perubahan yang dilakukan diimbangi dengan tertib administrasinya. Karena tertib administrasi itu menjadi sesuatu langkah yang tidak menyisakan persoalan di belakang hari.

“Kita ketahui biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Asian Games ini mencapai Rp 3,7 triliun. Dengan besarnya anggaran tersebut, maka nanti akan ada pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan apa yang dilakukan,” tutup politisi asal dapil Jambi itu. ■ (lep/sf)



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Foto: Jurnalis Jf

## Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, tidak ada fraksi-fraksi di DPR yang menyetujui atau melegalkan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Oleh karena itu pernyataan Ketua MPR RI itu tidak tepat, dan tidak ada pembicaraan khusus RUU LGBT.

“Saya kira pernyataan Pak Zulkifli Hasan itu kurang tepat, salah ucap atau salah kutip. Sebab, kalau saya pasti menolak legalisasi LGBT, yang merusak moral bangsa itu,” tegas Bambang pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1).

Menurut politisi Golkar itu, isu LGBT mencuat dalam pembahasan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang saat ini sedang dibahas Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR.

“Semangat Komisi III DPR justru selain menolak, juga ada perluasan daripada pemidanaan perilaku LGBT itu. Tidak hanya pada pencabulan terhadap anak di bawah umur, tapi hubungan sesama jenis dapat dikategorikan pidana asusila,” ujar mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.

Karena itu Bamsoet, demikian sapaan akrabnya, membantah adanya 5 fraksi yang setuju dengan LGBT tersebut. Demikian pula spekulasi Ketua Umum PAN yang menyebut LGBT untuk kepentingan Pemilu 2019.

“Saya kira tidaklah. Kan kalau itu yang dirugikan Pak Ketua MPR sama PAN kan. Saya tidak yakin itu. Saya kira mungkin terjadi *miss* komunikasi saja. Saya masih meyakini kalau Pak Zul masih berada dalam garis yang lurus dan tegak,” pungkasnya. ■<sup>(sc)</sup>

**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)  
**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahapari, S.H. M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)  
**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)  
**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)  
**REDAKTUR**  
Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi  
**SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari, Guntur Dewanto  
**ANGGOTA REDAKSI**  
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,  
Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,  
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega  
**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias  
**FOTOGRAFER**  
Soepardi, Naefurjii, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief  
Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah  
**ADMINISTRASI FOTO**  
Bagus Mudjiharjanto  
**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusanantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita



### PENERBITAN

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**STAF PRODUKSI**

Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

**DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)

**ADMINISTRASI**

Sjaefudin, S.Sos

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Mujiono

**PHOTOGRAFER ART**

Friederick Munchen

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Arif, Lamin, Remon,  
Yuliana Puspita, Ifan

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Kritik Kepada DPR Jadikan Vitamin Untuk Perbaikan Ke Depan



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (tengah)

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, lembaga perwakilan ini masih sering dikritik oleh berbagai pihak. Kritik tersebut harus diterima dengan lapang dada dan dijadikan sebagai masukan atau vitamin untuk melakukan perbaikan ke depan lebih baik. Demikian ditegaskan Ketua DPR yang akrab disapa Bamsuet dalam acara silaturahmi dengan para pejabat dan karyawan DPR di Ruang Pustakaloka Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1).

**K**etua DPR yang didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Ketua BURT Anton Sihombing, Plt Sekjen Damayanti, Ketua BKD Johnson Rajagukguk dan Irtama Setyanta Nugraha serta Deputi Administrasi Mardian Umar berpesanan kepada segenap pegawai di lingkungan DPR RI, untuk memperbaiki tata kelola dan suasana di gedung wakil rakyat tersebut.

“Ini adalah Lembaga Tinggi Negara yang harus dijaga kehormatannya,

keamanannya. Jadi dari mulai masuk, parkir sampai ruangan harus betul-betul dijaga. Kita tidak ingin lagi di gedung ini meledak bom, sebab sebelumnya pernah terjadi. Artinya pihak keamanan, Pamdal harus betul-betul tegas dalam melaksanakan tugasnya,” jelasnya.

Ia juga berharap, apa yang diamanatkan sebagai Ketua DPR bisa dilaksanakan dengan baik dalam sisa jabatan yang tinggal 18 bulan ini. “Untuk itu kepada para karyawan jangan kuatir ada pemecatan, penggantian dan seterusnya,” katanya disambut tepuk

tangan hadirin.

Ketua DPR, lanjut dia, Ini jabatan politik, sehingga bisa saja dirinya diganti karena salah ucap misalnya. Dia juga tidak merasa jabatan yang harus dipertahankan. Tapi jabatan ini harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Makanya saya tidak pernah risau dan ambil pusing, mau dipecat kapan saja diganti, inilah realitas politik. “Kemarin saya dipecat dari Komisi III, ya *nggak* apa-apa,” candanya yang kembali disambut tawa panjang.

Ketua DPR Bamsuet dikenal sosok yang sederhana, tegas dan humoris. Sebelum menyampaikan sambutan, para hadirin diminta jawab kalau dia mengatakan DPR mohon dijawab, «Dahsyat luar biasa». Bamsuet mengucap DPR lalu dijawab “ Dahsyat luar biasa,” pekik seluruh hadirin para pejabat dan karyawan DPR.

Sifat kesederhanaannya juga ditunjukkan pada hari pertama masuk sebagai Ketua DPR mengaku agak risih dan protes karena disambut Pamdal dengan hormat ala militer juga pada saat pulang kantor. “Saya tidak perlu ada penyambutan, saya pulang *nggak* perlu hormat mengangkat tangan. Santai saja,” ujarnya disambut tepuk tangan.

Masih dalam sambutan diwarnai humor, Bamsuet mengatakan dirinya sama dengan seluruh staf DPR. Yang membedakan hanya nasib saja. Di bagian lain, Pimpinan Dewan dari FPG ini juga berharap adanya penguatan SDM pendukung serta peningkatan kerja sama antara Setjen dan BKD dalam rangka menunjang kinerja dewan.

“Kita dan bapak-bapak sekalian adalah pelayan rakyat dan wakil-wakil rakyat yang ada di gedung ini, itulah yang kita layani. Melayani Anggota DPR sama dengan melayani rakyat. Tapi kalau mereka mengkhianati rakyat, kita gebuk ramai-ramai,” katanya yang lagi-lagi disambut tepuk tangan segenap karyawan DPR. ■ (mp/sc)

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) bisa menekan Israel jika bersatu. Menurut Fadli, negara-negara Muslim memiliki kapasitas yang sangat besar, terutama dalam hal sumber daya manusia dan energi.

“Karenanya, negara-negara Muslim harus bisa menggunakan kapasitasnya tersebut untuk mendukung kepentingan mereka sendiri, itu sebabnya kekuatan dunia Islam harus bersatu,” demikian diungkapkan Fadli kepada Ketua Parlemen Iran Ali Larijani dalam Konferensi ke-13 PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member States) di Teheran, baru-baru ini.

Mewakili Indonesia, Fadli menyampaikan, PUIC harus menjadi organisasi yang kuat dan berpengaruh melalui dukungan Iran. Terkait dengan isu Palestina, misalnya, Indonesia berharap agar negara-negara OKI bisa kompak dalam membela Palestina.

“Parlemen Indonesia konsisten menyuarakan imbauan agar negara-negara OKI memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Jika OKI kompak, itu pasti akan memberikan tekanan yang berarti untuk Israel,” seru Fadli.

Fadli mengingatkan, PUIC harus memfasilitasi penyatuan kekuatan tersebut. Menurutnya, parlemen negara-negara Muslim harus bersatu meredakan konflik di dunia Islam. Hal ini diperlukan agar negara Islam tak mudah diadu domba oleh Barat untuk kepentingan dagang. PUIC harus aktif terlibat memecahkan masalah-masalah dunia Islam.

Dirinya juga berharap agar pemerintah dan parlemen Iran terlibat dalam penyelesaian isu Rohingya. Ia bahkan meminta Ketua Parlemen Iran mengunjungi para pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh. Sebab, kunjungan tersebut akan memberikan dukungan moral dan politik yang berarti bagi penyelesaian kasus Rohingya.

“Saya juga menyampaikan agar dalam Konferensi PUIC di Iran kali ini bisa disepakati agar PUIC membentuk sebuah komite untuk kasus Rohingya. Komite



Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) didampingi Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf (kiri) dalam sidang Konferensi ke-13 PUIC di Teheran.

Foto: Dok/jk

## Jika Bersatu, Negara-negara OKI Bisa Tekan Israel

ini harus datang ke Myanmar dan ikut menekan Myanmar agar menghentikan aksi kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya. Selain itu, negara-negara OKI juga harus peduli dan membantu Bangladesh yang sejauh ini menjadi negara yang paling banyak dibanjiri oleh pengungsi Rohingya,” ujar Fadli.

Ketua Parlemen Iran Ali Larijani menyambut baik usulan-usulan yang disampaikan Indonesia dan sebagai tuan rumah berjanji akan mengakomodasi pikiran-pikiran tersebut. Ia menilai, Indonesia punya posisi dan kontribusi penting, baik di dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) maupun dalam PUIC.

Sama halnya dengan Indonesia, Iran juga berpandangan peran PUIC selama ini memang belum optimal, baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi dan perdagangan. Padahal, PUIC punya potensi yang sangat besar. Karena itu, Iran mengapresiasi pemikiran dari delegasi Indonesia. Parlemen Iran melihat kontribusi Indonesia bagi perbaikan PUIC juga sangat tinggi.

Larijani juga mengharapkan agar kerja sama antara Indonesia dan Iran semakin

meningkat. Menurutnya, Indonesia dan Iran sebenarnya telah memiliki hubungan sejak lama, tapi hubungan ekonomi antara Iran dengan Indonesia masih rendah, kalah dibanding hubungan Iran dengan Turki.

Untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan Iran, Larijani mengusulkan adanya pertukaran kunjungan bisnis. “Juga perlu ada penerbangan langsung dari Teheran ke Jakarta. Selama ini yang ada baru carter flight ke Bali yang sifatnya non-reguler. Kami tentu saja menyambut baik usulan tersebut, dan akan kami teruskan ke pemerintah. Hubungan kedua negara memang harus makin ditingkatkan ke depannya,” terang Fadli.

“Saat ini nilai hubungan Indonesia dan Iran baru mencapai US\$350 juta. Tahun lalu, kita baru merencanakan untuk memperbesarnya menjadi US\$2 miliar. Padahal hubungan dagang Iran dengan Turki tahun lalu sudah dirancang akan meningkat menjadi US\$ 30 miliar per tahun. Sebagai negara muslim terbesar, hubungan dagang antara Indonesia dengan Iran harusnya bisa lebih besar lagi,” pungkasnya. ■(ann/sc)

# DPR Minta Parlemen Asia Pasifik Tuntaskan Masalah Rohingya dan Palestina

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyuarakan agar parlemen se-Asia Pasifik terlibat aktif bersuara dalam proses perdamaian dunia, termasuk penyelesaian pengungsi Rohingya dan kemerdekaan Palestina.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Sidang Pleno Forum Parlemen Asia Pasifik di Hanoi, Vietnam



sebagai *second track diplomacy*, dimana parlemen mewakili suara rakyatnya yang utuh untuk disampaikan dalam berbagai forum dunia atau kawasan. “Karena itu, kami mendorong parliamentary diplomacy agar lebih aktif dalam perdamaian dunia,” sambungnya.

Senada dengan sikap parlemen Indonesia yang disuarakan Fahri, parlemen Kanada juga menyatakan perlunya menyelesaikan masalah Rohingya dengan investigasi dan akses untuk bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya. Parlemen Brunei Darussalam dan Malaysia juga mendukung dan menyatakan hal yang sama.

Selain masalah tersebut, untuk menciptakan perdamaian dunia, delegasi juga membahas permasalahan terorisme dan keamanan kawasan dalam plenary meeting APPF. ■ (ann/sc)

Fungsi diplomasi parlemen berperan sebagai *second track diplomacy*, dimana parlemen mewakili suara rakyatnya yang utuh untuk disampaikan dalam berbagai forum dunia atau kawasan.

Demikian disuarakan Fahri saat memimpin delegasi Parlemen Indonesia dalam Sidang Pleno Forum Parlemen Asia Pasifik dalam Plenary Meeting - Asia Pacific Parliamentary Forum, di Hanoi, Vietnam, Jumat (19/1).

“Kami mendorong parlemen tiap negara di kawasan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah bangsa-bangsa yang tertindas. Misalnya masalah Palestina dan pengungsi Rohingya. Kami tak mengerti mengapa masalah ini tidak selesai di tangan diplomasi antar eksekutif atau pemerintah bangsa-bangsa terkait,” seru Fahri.

Dalam rilisnya, Fahri menjelaskan, fungsi diplomasi parlemen berperan

# New Zealand Perkuat Kerja Sama Eksplorasi Geothermal

New Zealand sebagai negara yang pemanfaatan geothermalnya (panas bumi) mencapai 60 persen, ingin terus memperkuat kerja sama eksplorasi geothermal dengan Indonesia. Negara ini ingin membantu Indonesia memaksimalkan pemanfaatan geothermal untuk secara perlahan meninggalkan energi fosil.

Demikian mengemuka saat Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bertemu dengan Kepala GNS of Geothermal Science, New Zealand Greg Bignall, di ruang kerjanya, Kamis (17/1).

Kerja sama dengan New Zealand ini sudah berjalan sangat baik. Dan New Zealand ingin terus memperkuatnya agar pemanfaatan geothermal di dunia bisa segera menggantikan energi fosil.

“Kami banyak dapat bimbingan dari GNS New Zealand. Kita ingin meningkatkan geothermal nasional yang sekarang baru dieksplor 5-6 persen. Beda dengan di New Zealand yang sudah 50-60%. Ini merupakan kemajuan yang cukup tinggi. Setelah saya banyak terlibat dalam pemanfaatan geothermal, kini mulai tumbuh membaik. Kita harus pacu terus pemanfaatannya,” ujar Agus kepada Parlemen usai

menerima Kepala GNS of Geothermal Science, New Zealand Greg Bignall.

Dikatakan politisi Partai Demokrat itu, energi geothermal merupakan energi baru terbarukan. Ia tak pernah habis. Dengan ekosistem yang ada berupa hujan dan air yang masuk ke perut bumi, lalu dijadikan uap, energi ini bisa terus terbarukan untuk dimanfaatkan. Untuk itu, sambung Agus, kestabilan ekosistem harus terus dijaga, agar sumber energi geothermal menjadi maksimal.

Agus juga mengungkapkan, bantuan teknis dari New Zealand sedang diarahkan ke Way Sano, NTT, tempat eksplorasi geothermal dilakukan. “New Zealand ingin memperkuat kerja sama ini sehingga mendapat banyak manfaat bagi dua negara. Begitu juga pemerintah New Zealand sangat mendorong kemajuan geothermal di Indonesia. Sekarang *transfer knowledge* dari New Zealand ke Indonesia juga sudah cukup bagus,” kilah Agus. (mb/

sc)



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (kanan) bersama Kepala GNS of Geothermal Science, New Zealand Greg Bignall, di Ruang Kerjanya

17/01/2018

# DPR Tolak Kebijakan Impor Garam

Komisi IV DPR RI menolak impor garam tanpa rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana amanat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/1).



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena

garam hanya sejumlah 2,2 juta ton, mengingat garam yang ada di petani garam kita cukup. Angka Ini tentu jauh berbeda,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena di sela-sela rapat kerja.

Ditambahkan Michael, padahal amanat undang-undang menyatakan bahwa impor hanya bisa dilakukan jika mendapat rekomendasi dari kementerian teknis terkait. Dengan demikian, Menko Ekonomi tidak mengindahkan aturan hukum tersebut. Dari sana, Komisi IV sepakat untuk menolak impor garam tersebut yang dilakukan Menko Perekonomian tanpa rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI Fauzi Amro yang ikut menolak impor garam tanpa rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kementerian teknis.

Lebih jauh Fauzi mengatakan bahwa impor garam tersebut disebabkan karena data yang tidak match atau tidak sinkron antara data KKP dengan data BPS (Badan Pusat Statistik) serta data di Kementerian Perindustrian. Ke depan ia berharap

agar tidak ada lagi ketidaksesuaian data seperti itu.

Kedua, impor juga disebabkan karena tata kelola pergaraman yang tidak baik. Bahkan sempat beredar kabar bahwa kandungan garam dalam negeri kalah dengan garam impor. Kabar tersebut tentu tidak benar dan menjatuhkan pasar garam negeri sendiri. Oleh karena itu ia berharap adanya perbaikan tata kelola pergaraman. Mulai dari budidaya garam di petambak garam sampai pada tahap pasca panen.

Sementara itu dalam rapat kerja tersebut, Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa impor garam ini sudah berlangsung sejak 15 tahun yang lalu, dan untuk impor kali ini pihaknya hanya merekomendasikan impor garam sebesar 2,17 juta ton garam untuk industri. Namun rekomendasi tersebut tidak diindahkan, melalui Menteri Koordinator Perekonomian telah memutuskan untuk melakukan impor garam sebesar 3,7 juta ton.

“Setelah menginvestigasi, kami yakin garam petani cukup bagus dan cukup banyak. Oleh karena itu lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2017 kami hanya merekomendasikan impor garam sebesar 2,17 juta ton untuk industri. Namun rekomendasi kami tidak diindahkan,” kata Susi.

Berdasarkan penjelasan dari Menteri Susi dan diskusi dalam rapat kerja tersebut, maka Komisi IV ke depan sepakat untuk menggelar rapat gabungan Komisi IV DPR dengan Komisi VI DPR dengan pihak pemerintah yang terdiri dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Koordinator Ekonomi, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Badan Pusat Statistik. ■ (gym/st)

“Menteri Koordinator Perekonomian menyatakan akan mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton. Dengan alasan untuk menjaga stabilitas dunia industri yang memang membutuhkan bahan baku garam. Padahal menurut penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pihaknya hanya merekomendasikan untuk impor

## DPR Dorong Industrialisasi Pangan

Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Utomo angkat bicara menanggapi rencana pemerintah melakukan impor garam, yang sebelumnya ingin impor beras. Kebutuhan bahan pangan merupakan kebutuhan yang teramat krusial, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah diminta fokus terhadap program kedaulatan pangan melalui industrialisasi pangan.

Sartono mengatakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ingin target utamanya ialah swasembada pangan. Komisi VI DPR mendorong dan mendukung pemerintah dalam membuat industri pangan.

“Masa sih kita tidak bisa membuat industri garam ini. Ya otomatis fokus harusnya untuk swasembada kebutuhan bahan pokok ini. Investasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) difokuskan kepada industrialisasi, seperti garam, pertanian, dan sebagainya ini,” katanya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/1).

Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan pemerintah, bahwa pembangunan negara tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek yang maha besar adanya, sedangkan satu sisi kita kekurangan bahan pangan, dari garam, gula, daging, bahkan beras.

“Nah ini perlu berani melihat kembali 3 tahun yang lalu janji kampanye beliau



Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Utomo

(Joko Widodo), berbicara tentang swasembada pangan ini. Sekarang-kan meleset dari janjinya. Kami dari DPR mengingatkan selalu, masa kita akan terus impor pangan,” ujarnya.

Oleh karena itu, industri pangan ini harus terus digenjot, karena sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo dengan mewujudkan industri pangan. Pangan adalah kebutuhan yang mendasar dari kehidupan ini dan negara Indonesia yang subur dan makmur ini kita bisa kekurangan kebutuhan bahan pangan.

“Ini perlu ada koreksi dalam membangun bangsa ini. Keseriusan dari negara ini, apakah serius ini benar-benar swasembada pangan atau tidak, kalau tidak, yang akan diuntungkan hanya pedagang saja, jalan pintas tidak perlu keras-keras tidak perlu industri dan yang dirugikan ya petani dan masyarakat luas. Kita di situ tidak akan menumbuhkan tenaga kerja. Dengan industrialisasi pangan dapat menyerap tenaga kerja,” tegasnya. ■(as/sc)

## Semua Fraksi DPR Tidak Setuju LGBT

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, semua fraksi di DPR tidak menyetujui perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Marwan menjelaskan, masalah tentang LBGT memang sedang dibahas di Komisi III dalam RUU KUHP dan akan segera dibahas dalam RUU Kekerasan Seksual di Komisi VIII.

“Kami akan membahas hal ini penuh dengan kehati-hatian, karena hal ini sangat sensitif dan menyangkut perkembangan situasi kemasyarakatan kita,” ungkapnya di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/1).

Maka dari itu, terkait pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mengatakan lima fraksi menyetujui perilaku LGBT ini patut dipertanyakan. “Kita menyayangkan pernyataan Pak Zulkifli. Kalau ada suara-suara yang ingin membawa Pak Zulkifli dilaporkan ke MKD, saya kira itu satu kenyataan. Karena tidak ada satu pun fraksi yang menyatakan setuju dengan LGBT,” jelasnya.

Lebih lanjut politisi partai PKB ini menegaskan, tidak ada fraksi yang setuju dengan perilaku LGBT, apalagi melegalkan dalam Undang-Undang. “Masyarakat harus percaya DPR tidak seperti itu, maka membantah pernyataan Pak Zulkifli bukan bagian dari kontroversi dalam tubuh DPR. Tapi mungkin Pak Zulkifli mendapat informasi yang kurang pas,” jelasnya.

“Kalau ada yang mendesak Pak Zulkifli untuk membuka itu, kami pikir wajar. Pernyataan itu patut dipertanyakan sumbernya dari mana, karena ini sudah menjadi bola liar orang meraba-raba, kita sudah di hujat ini. Maka layak Pak Zulkifli membuka dari mana informasi itu,” tambahnya.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang

Sebelumnya diketahui, Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, UU LGBT tengah dibahas di DPR saat ini. Dia pun mengungkapkan ada lima fraksi di DPR yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). ■(rum/sc)



Ketua Pansus RUU Pertembakauan DPR RI Firman Soebagyo

## RUU Pertembakauan Salah Satu RUU Penting dan Strategis

Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan merupakan salah satu RUU yang penting dan strategis. Karena dalam RUU ini, ada 3 aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

baik dari hasil ekspor maupun dari hasil produksi rokok nasional kita, yang saat ini mencapai Rp 130 sampai Rp 150 triliun per tahunnya,” papar Firman.

Artinya di dalam postur APBN kita, lanjut politisi Partai Golkar ini, kontribusi terhadap penerimaan negara adalah dari tembakau. “Kalau ini akan kita matikan, maka pemerintah atau negara harus mampu mencari alternatif lainnya sebagai pengganti. Ini belum bisa terjawab. Oleh karena itu, ini harus menjadi pertimbangan utama pemerintah,” tegasnya.

Sebagai pertimbangan kedua yaitu aspek sosial, bahwa kesejahteraan masyarakat sekarang ini juga sudah bisa dirasakan terutama petani tembakau di seluruh wilayah Indonesia, seperti di Temanggung, kemudian di Jawa Tengah, Sumatera, dan NTT.

“Dimana banyak petani-petani tembakau yang hidupnya jauh lebih sejahtera daripada petani lainnya. Petani tembakau ini mampu membangun desa atau daerahnya dari hasil tembakau itu sendiri. Petani tembakau ini juga mampu mensekolahkan anaknya sampai ada yang menjadi insinyur, dokter, dan sebagainya,” terang anggota dewan dapil Jawa Tengah ini.

Kemudian dari aspek budaya, dijelaskan Firman, sejarah dari kretek nasional sejak pabrik milik Pak Nitisemito dan kemudian pabrik rokok Nojorono di era sebelum penjajahan Belanda itu sudah menciptakan rokok kretek. “Kretek itu unik, karena ada campuran dari bahan-bahan lainnya seperti cengkeh dan sebagainya yang menjadi keunikan. Dan kretek itu tidak ada di negara lain, kecuali di Indonesia,” ungkapnya. ■<sup>(6)</sup>

Hal tersebut dinyatakan Ketua Pansus RUU Pertembakauan DPR RI Firman Soebagyo, di sela-sela rapat dengar pendapat umum dengan Komunitas Kretek Indonesia, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia dan Masyarakat Pemangku Kepentingan Kretek Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1).

“Jika dilihat dari aspek ekonomi, pertembakauan sudah bisa memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara

## Marak Kecelakaan Kerja, Komisi V Akan Panggil Menteri PUPR

Komisi V DPR RI berencana akan memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kecelakaan kerja sektor konstruksi yang belakangan kerap terjadi. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo, ia pun sangat menyayangkan salah satunya insiden kecelakaan kerja saat pengerjaan pemasangan box girder LRT di Jalan Kayu Putih Raya, Pulogadung, Jakarta Timur yang menyebabkan 5 orang terluka.

“Kecelakaan kerja seperti ini sudah berulang, seharusnya bisa dihindari jika aspek keselamatan dan keamanan dipenuhi penyedia jasa konstruksi,” kata Sigit Sosiantomo dalam rilisnya, Rabu (24/1).

Sesuai dengan pasal 52 UU No

2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Jaskon), kata Sigit, penyedia jasa dan sub penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Jika tidak, penyedia jasa dapat dikenakan sanksi administratif

mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara konstruksi hingga pencabutan ijin sebagaimana diatur dalam pasal 96 UU Jaskon.

Insiden kecelakaan kerja ini, kata Sigit, beberapa kali terjadi dalam rentang waktu 3 bulan terakhir yang terjadi dalam proyek yang dikerjakan oleh perusahaan konstruksi pelat merah tersebut. Jenis kecelakaan kerja yang terjadi pun tergolong serupa.

Diawal Januari 2018, insiden kecelakaan kerja juga terjadi di proyek pembangunan jalan Tol Depok-Antasari, Jakarta Selatan. Girder jalan tol ini roboh akibat tersenggol alat berat yang berada di lokasi kejadian.

# PT BSP Disarankan Ubah Rencana Perjanjian Kontrak Dengan PLN

Rencana kerja sama antara BUMD Provinsi Jambi PT. Bumi Samudra Perkasa (BSP) dengan PLN terkait penyediaan power plan sebesar 5 MW sampai hari ini belum terealisasi. Padahal, PT. PetroChina sebagai sumber penyedia listrik sudah siap bekerjasama dengan PT. BSP, yang nantinya PLN akan membeli listrik dari perusahaan BUMD ini.

“Menurut saya mungkin PLN sudah tercukupi untuk kebutuhan listrik di Provinsi Jambi ini, tapi nanti kita akan dalam rapat dengan Komisi VII. Tapi tadi ada usulan agar PT. BSP mengubah rencana suplai dari listrik menjadi City Gas yang dikelola Pertamina,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu usai rapat di Kantor PT.



Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu

PetroChina di Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumat (19/1).

Menurut politisi dapil Sumbar ini, bahwa gas bumi adalah energi yang murah. Tanpa disubsidi saja, biaya untuk pemakaian gas bumi hanya separuh dari LPG. Selain itu, sambungan gas ke

rumah tangga lebih praktis.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo. Ia menyatakan, lebih baik PT. BSP menyediakan gas bumi untuk kemudian diolah menjadi City Gas. “Di Provinsi Jambi ini kan sudah ada jaringan City Gas yang dibuat oleh Kementerian ESDM, tinggal PT. BSP memperluas jaringannya saja, secara biaya pasti lebih murah dibandingkan menyediakan power plant untuk PLN,” jelasnya.

Selain itu, Politisi F-Gerindra ini juga menyangkan kurang responnya PLN terhadap rencana kerja sama dengan BUMD Provinsi Jambi ini. “Mestinya Kementerian ESDM inisiatif, walaupun PLN dibawah Kementerian BUMN, tetapi mestinya ada koordinasi. Supaya gas bumi di Provinsi Jambi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, dan ada juga pemasukan untuk kas daerah melalui BUMD ini,” tuturnya. ■ (jks/sc)



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

“Karena kejadian ini sudah berulang kali, Komisi V akan memanggil Kementerian PUPR, khususnya Dirjen Bina Konstruksi untuk mengevaluasi apakah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek konstruksi sudah diterapkan, atau baru sebatas sosialisasi saja. Jangan sampai, regulasinya sudah ada, tapi tidak diterapkan,” kata Sigit.

Sebagaimana diketahui, data Kementerian PUPR, hingga 2015, tingkat kepatuhan perusahaan kontraktor nasional terhadap SMK3 baru mencapai 30%. Pemerintah pun berusaha meningkatkan persentase tersebut secara bertahap, dengan estimasi kenaikan mencapai 8% setiap tahunnya, sehingga pada 2019 tingkat kepatuhan dapat mencapai 70%.

Rendahnya tingkat kepatuhan kontraktor terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 5/2014 tentang Pedoman

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), karena hanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melaksanakan aturan SMK3 yang dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi.

Karena itu, pemerintah kemudian merilis Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum pada tahun lalu.

“Komisi V akan menagih komitmen PUPR selaku regulator dalam pengawasan dan evaluasi penyedia jasa konstruksi. Apakah selama ini pemerintah sudah melakukan pembinaan dan penerapan sanksi pada penyedia jasa yang tidak memenuhi SMK3,” tutup Sigit. ■ (hs/sc)



Tim Kunspek Komisi VII DPR meninjau kapal pembangkit listrik MUPP di Prov. NTT

## DPR Apresiasi Sistem Kelistrikan di SulutTeng dan Gorontalo

Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) terus digenjut oleh PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (SulutTengGo) guna memenuhi kebutuhan kelistrikan masyarakat. Dengan demikian, rasio elektrifikasi di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo dapat meningkat sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan perekonomian masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menyampaikan apresiasi bahwa di Wilayah SulutTengGo memiliki sistem kelistrikan yang baik yakni bauran energi baru dan terbarukan yang cukup besar sekitar 48% dan ini merupakan yang terbesar dari beberapa regional di Indonesia.

“Ini bisa menjadi contoh daerah-daerah lain untuk membaaur dan mengkombinasikan energi panas bumi, energi air serta energi baru terbarukan lainnya, karena ini sangat bagus dan ramah dengan lingkungan,” ungkapnya, Sabtu (20/1).

Sebagaimana hasil dari Paris Agreement pada 2015, bahwasannya mendorong upaya untuk menahan kenaikan temperatur global di bawah dua derajat celsius dan mengembangkan kebijakan mengurangi emisi gas, salah satu caranya dengan mengurangi penggunaan energi fosil serta beralih kepada energi baru terbarukan.

Satya juga tegaskan bahwa, tantangan dalam pengembangan EBT ini cukup besar dan ini menjadi tantangan dan kerja bersama dalam mewujudkan pemanfaatan EBT yang lebih maksimal.

“Di SulutTengGo ada angka 800 desa yang belum teraliri listrik, padahal di seluruh wilayah Indonesia ada angka 2600 desa yang belum teraliri listrik, jadi sepertiganya ada di wilayah SulutTengGo, dan ini menjadi tantangan mereka ke depan,” tegasnya.

“Saat ini memang wilayah SulutTengGo masih disuplai oleh Kapal Pembangkit Listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) ‘Karadeniz Powership Zeynep Sultan’ berkapasitas 120 Mega Watt (MW), namun *power plan-power plan* di wilayah tersebut terus digenjut sehingga ketika MVPP ini berakhir maka wilayah ini sudah siap,” ungkapnya.

Sementara anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menilai bahwa sistem kelistrikan di SuluTengGo memang dalam beberapa tahun lalu mengalami defisit listrik, sering terjadi pemadaman karena kapasitas yang tersedia jauh di bawah beban puncak. Dengan menyewa MVPP ini maka sangat membantu daerah tersebut, sehingga saat ini mengalami surplus listrik.

“Sistem kelistrikan di SulutTengGo ini mempunyai struktur energi kombinasi yang sangat ideal dan terbagus di Indonesia, karena penggunaan energi baru terbarukan sangat besar. Energi baru terbarukan yang menonjol ini adalah energi panas bumi dan energi air,” ungkapnya.

“Ke depan di Indonesia secara keseluruhan harus menggunakan energi baru terbarukan, karena energi ini bersih dan ramah lingkungan serta potensinya juga sangat besar. Kita perlu mencontoh Wilayah SulutTengGo yang penggunaan EBT-nya sudah cukup tinggi,” tegas Kurtubi. ■ (skr/sd)



# RUU Penyiaran Masih Diharmonisasi

RUU Penyiaran yang selama ini tak terdengar progresnya, ternyata masih ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi dan disinkronisasi. RUU itu ternyata sudah diserahkan Komisi I ke Baleg sejak Februari 2017 lalu. Komisi I kini sedang menunggu hasil Baleg untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

**K**etua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan hal tersebut kepada para wartawan dalam konpres persnya di Ruang MKD DPR, Senin (22/1). “Kami masih menunggu hasil dari Baleg dan sudah menghubungi pula Pimpinan DPR Bidang Korpolkam agar kami bisa segera menyampaikan dalam Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan Tingkat I,” paparnya.

Pimpinan DPR juga, kata Kharis, sedang mengupayakan koordinasi dengan Baleg untuk mendapat solusi terbaik agar RUU yang diusulkan Komisi I ini bisa segera menjadi RUU Penyiaran Inisiatif DPR.

Isu-isu krusial yang selama ini menjadi perdebatan panjang juga sudah

diselesaikan Komisi I. Seperti diketahui, RUU Penyiaran ini sudah lama sekali mengendap dan sedang ditunggu hasilnya oleh industri penyiaran.

“Kami menunggu sudah lama sekali, sekitar lima kali masa sidang. Untuk itu, kami konsultasi ke Pimpinan DPR untuk mendapat solusi terbaik. Mestinya dua kali masa sidang sudah diselesaikan. Ini sudah lima kali belum selesai juga. Kami berharap secepatnya. Posisi kami adalah mengusulkan draf yang disepakati di Komisi I kepada Baleg untuk diharmonisasi dan disinkronisasi,” jelas politisi PKS itu.

Kharis mengatakan, hasil harmonisasi dan sinkronisasi Baleg belum diterima Komisi I. Kelak bila sudah diajukan ke paripurna, barulah Komisi I mulai



Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari

Foto: Anief/jk

membahasnya. “Jadi, sesungguhnya ini masih draf. Setelah ini diajukan lagi ke paripurna sebagai draf RUU Usul Inisiatif DPR RI. Di sinilah dimulai pembahasan yang sesungguhnya dengan pemerintah,” tutupnya mengakhiri wawancara dengan para wartawan. ■ (mb/ sc)

## KPK Jangan Serakah Urusi Korupsi Sektor Swasta



Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.

Foto: Anief/jk

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengingatkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak terlalu nafsu, dimana ingin terlibat menangani perkara korupsi di sektor swasta murni. Pasalnya jika berpijak pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), KPK tidak bisa menangani korupsi di sektor swasta murni yang tidak ada unsur penyelenggara negaranya.

“Laporan yang di Pengaduan Masyarakat (Dumas) saja masih ribuan belum tertangani. Lah, ini ada isu baru mau mengenai sektor korupsi swasta murni juga. Ibarat anak, itu mau semauanya. Apakah itu dimakan atau tidak urusan belakang. Jangan seperti itu. Nafsu besar, tapi kapasitas terbatas,” kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (23/1).

Lebih lanjut Arsul menuturkan, KPK tidak bisa masuk ke ranah korupsi sektor swasta. Sebab, dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya membahas soal pidana materil. “Tidak bicara soal kelembagaan ataupun hukum acara,” ujar politisi F-PPP itu.

Saat ini, masih kata Arsul, DPR sedang memfinalisasi RUU KUHP,

yang menyepakati tindak pidana korupsi sektor swasta, yaitu yang murni dilakukan pihak swasta tanpa mengikutsertakan penyelenggara negara dimasukkan ke KUHP.

“Negara kita sudah meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC). Namun dalam legislasinya masih banyak

kekurangan, sehingga norma hukum tindak pidana korupsi di sektor swasta akan diatur di RUU KUHP,” ungkapnya.

Arsul menambahkan, jika KPK bisa menangani perkara korupsi sektor swasta, aturan itu harus masuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau merevisi undang-undang

kelembagaan KPK.

“Tapi kan kita tahu, KPK menutup pintu lebih dulu jika ada wacana merevisi UU KPK. Padahal paling tepat, kalau mau memperluas kewenangan, ya, di undang-undang lembaga itu sendiri,” tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■(rum/sj)

## Seluruh Fraksi dan Pemerintah Setuju Larang Minol Dijual Bebas

Ketua Panitia Khusus RUU Minuman Beralkohol (Minol) DPR RI Arwani Thomafi berkomentar terkait maraknya pemberitaan terkait perkembangan pembahasan RUU Minol yang saat ini beredar di masyarakat.

Arwani menegaskan, saat ini Pansus RUU Minol masih bekerja, terakhir rapat dilakukan pada Rabu, 17 Januari 2018 guna membahas jadwal rapat dengan pemerintah di masa sidang ini. Masa kerja Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol diperpanjang karena memang ada poin krusial yang belum menemukan titik temu di antara fraksi-fraksi di parlemen.

“Poin krusial dalam pembahasan RUU Minol terkait dengan penamaan judul RUU apakah menggunakan nomenklatur larangan minuman beralkohol, atau pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta tanpa embel-embel dua nomenklatur tersebut,” ungkap Arwani melalui rilis yang diterima Parlemen, Senin (22/1).

Di poin ini, fraksi-fraksi mengalami perbedaan pandangan. Fraksi yang setuju menggunakan nomenklatur larangan adalah Fraksi PPP dan Fraksi PKS yang kemudian dalam perjalanannya Fraksi PAN juga setuju.

Adapun yang setuju menggunakan nomenklatur pengendalian dan pengawasan yakni Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, dan Fraksi NasDem.



Ketua Pansus RUU Minol DPR RI Arwani Thomafi

Poin krusial dalam pembahasan RUU Minol terkait dengan penamaan judul RUU apakah menggunakan nomenklatur larangan minuman beralkohol, atau pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol

Sedangkan fraksi yang mengusulkan judul tanpa embel-embel larangan dan pengendalian dan pengawasan yakni Fraksi Golkar dan Fraksi PKB.

Adapun soal isu minuman beralkohol dijual bebas di warung-warung, semua fraksi dan pemerintah secara bulat setuju untuk melakukan penertiban dengan melarang penjualan minuman beralkohol dijual di tempat-tempat bebas.

“Jadi, tidak benar bila ada informasi yang menyebutkan soal komposisi fraksi-fraksi di DPR yang setuju minuman beralkohol dijual secara bebas. Saya tegaskan seluruh fraksi dan pemerintah sepakat untuk menertibkan penjualan minuman beralkohol,” tegas Arwani.

Sebagaimana diketahui, Fraksi PPP merupakan inisiator tunggal pengusulan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini yang dilakukan sejak DPR periode 2009-2014. Namun karena waktunya tidak memungkinkan, usulan tersebut kandas.

Usulan tersebut diperjuangkan kembali di DPR periode 2014-2019 melalui Badan Legislatif DPR. Dalam pengusulan tersebut, Fraksi PKS turut serta menjadi inisator. Praktis, sejak itu, secara formal pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol ada dua fraksi yakni PPP dan PKS.

Pada tahun 2015, DPR dan pemerintah sepakat untuk membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol dan terbentuklah Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol yang hingga saat ini terus bekerja. ■(hs/sc)

# DPR Dorong Pertamina Kelola Blok East Kalimantan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah untuk lebih memberikan ruang dan kesempatan bagi BUMN (badan usaha milik negara) dan BUMD (badan usaha milik daerah) mengelola dan mengolah kekayaan alam Indonesia termasuk minyak dan gas bumi.

“Sudah cukuplah asing menikmati kekayaan alam Indonesia. Sekarang saatnya memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya bagi BUMN dan BUMD untuk bisa mengelola dan mengolah minyak dan gas bumi serta kekayaan alam lainnya. Hal ini semata untuk menambah APBN serta memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara,” ujar Herman saat Kunjungan Spesifik Komisi VII ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (19/1).

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Komisi VII DPR, Chevron, Pertamina,

SKK Migas, Kementerian ESDM dan Bupati PPU (Penajam Paser Utara), Direktur Hulu PT. Pertamina Syamsu Alam menegaskan kesediaannya menerima penugasan dari pemerintah untuk mengelola Blok East Timur yang pengelolaannya oleh Chevron akan habis kontraknya pada 24 Oktober 2018 mendatang.

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Petrochina akan mengambil alih blok tersebut, menyusul rencana pemerintah yang akan melelangkan Blok Migas East Kalimantan tersebut. Konon hal tersebut diutar belakangi hasil kajian yang disampaikan Pertamina bahwa

blok tersebut tidak ekonomis dengan menggunakan skema “gross split”.

Namun Syamsul menjelaskan bahwa ketika itu, Pertamina meminta tambahan waktu untuk melakukan kajian keekonomian lapangan secara hati-hati untuk menganalisa dampak resiko kerugian terkait adanya biaya pemulihan lapangan (Abandonment Site Restoration/ASR) pasca produksi. Saat ini Pertamina dalam posisi menerima penugasan dari pemerintah.

“Setelah kunjungan ini kami akan rapat dengan Menteri ESDM, Pertamina, dan seluruh instansi terkait untuk mendengar laporan kelanjutan pengelolaan Blok East Kalimantan. Sejak awal dan sampai sekarang pun kami mendukung Pertamina selaku BUMN untuk bisa mengelola Blok East Kalimantan,” pungkas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. ■ (ayu/sc)



Tim Kunspek Komisi VII DPR dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron berfoto bersama Bupati Penajam Paser Utara, usai melakukan rapat di Prov.Kalimantan Timur.



Foto: Oji Jk

Ketua GKSB DPR RI – Jepang, Aryo Djojohadikusumo (kedua dari kanan) berjabat tangan dengan Pimpinan Parlemen Jepang Toshihiro Nikai di Gedung DPR

## Jepang-Indonesia Peringati 60 Tahun Hubungan Diplomatik

Bulan Januari ini, tepatnya pada tanggal 20 Januari 2018, Indonesia dan Jepang memperingati 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang dimulai pada 20 Januari 1958. Kerjasama berbagai sektor akan ditingkatkan, termasuk menjadi tuan rumah bersama untuk Kejuaran Dunia Bola Basket 2023.

Tukar pikiran dan pengalaman dalam menyukseskan hubungan dilakukan kedua parlemen. Selain even olahraga yang menjadi penguat hubungan kedua negara, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan kerja sama pendidikan.

Ini hanya bagian dari peringatan 60 tahun hubungan kedua negara. Kebetulan pada 2018 ini Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Asian Games, dan Jepang menjadi tuan rumah Olimpiade 2020. Kedua negara akan saling bantu menyukseskan dua even besar olahraga tersebut. Demikian mengemuka dalam pertemuan Parlemen Jepang yang dipimpin Toshihiro Nikai dengan GKSB DPR yang dipimpin Aryo Djojohadikusumo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1).

“Ada perayaan besar-besaran dari Pemerintah Jepang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Sekjen

LDP ingin menekankan kerja sama yang lebih baik lagi. Mempererat hubungan parlemen Jepang dan Indonesia. Kebetulan Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games. Tahun 2018 juga akan ada bantuan dari perusahaan Jepang dalam bidang keamanan untuk antiterorisme,” jelas Aryo usai pertemuan.

Toshihiro sendiri selain anggota parlemen juga adalah Sekjen LDP, partai penguasa di Jepang. Tukar pikiran dan pengalaman dalam menyukseskan hubungan dilakukan kedua parlemen. Selain even olahraga yang menjadi penguat hubungan kedua negara, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan kerja sama pendidikan. Dikatakan Aryo, pelajar Indonesia masih sedikit yang belajar ke Jepang. Begitu juga sebaliknya.

“Jumlah pelajar Indonesia yang belajar di Jepang masih sedikit dibanding Vietnam dan Nepal. Kita ingin memperbanyak pelajar Indonesia belajar di sana. Begitu juga pelajar Jepang yang belajar di sini,” ucap politisi Gerindra itu. ■ (mh/sc)

## Stabilitas Keuangan Daerah Sumsel Terjaga

Perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2017 terus menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Realisasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan di Triwulan III 2017 sebesar 5,56% lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 sebesar 5,26%. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI ke Provinsi Sumatera Selatan.

Hafisz juga menyampaikan bahwa konsumsi pemerintah pada Triwulan III 2017 mengalami peningkatan, akibat adanya percepatan pembangunan proyek infrastruktur pemerintah. Inflasi Sumatera Selatan pada Triwulan III 2017 tercatat sebesar 3,00%, lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi Triwulan yang sebelumnya sebesar 4,31%.

“Stabilitas keuangan daerah di Sumatera Selatan cukup baik dan terjaga, yang tercermin dari indikator stabilitas keuangan daerah Sumatera Selatan, baik rumah tangga maupun korporasi. Indikator Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun aset mengalami

peningkatan serta kredit masih tumbuh positif walaupun sedikit mengalami perlambatan,” ujar Hafisz di Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (19/1).

Pada kunjungan kerja tersebut, Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan data dan informasi terkini, guna mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan.

“Kami ingin mendapatkan informasi dan gambaran terkait pelaksanaan tugas dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Kanwil Ditjen Pajak Provinsi



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir

Sumatera Selatan, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan,” ujar politisi F-PAN itu.

Hafisz berharap, semua data dan informasi yang didapatkan langsung di lapangan tersebut, dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara khususnya bagi penguatan prinsip *good governance*. ■ (dep/ ss)



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Prakosa

## Pembangunan Sektor Mikro Perlu Dilakukan di Yogyakarta

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Prakosa menyoroti adanya anomali pembangunan yang terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta, meskipun memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, namun tingkat ketimpangan di Yogyakarta termasuk dalam kategori tinggi.

“Yogyakarta ini IPM-nya tinggi, indeks kebahagiaannya tinggi, tapi kita juga lihat gini rasionya termasuk yang tinggi di Indonesia yakni 0,40. Ini menjadi evaluasi dalam pertemuan tadi,” ungkap Prakosa kepada Parlemenaria usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil Bank Indonesia Provinsi Yogyakarta, Jumat (19/1).

Atas persoalan itu, politisi PDI-Perjuangan ini menyarankan agar

pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan di sektor mikro seperti UMKM agar pertumbuhannya menyentuh langsung ke masyarakat Yogyakarta.

“Bahwa perlu perhatian pemerintah agar fokus pada sektor masyarakat banyak yang rill seperti UMKM agar dikembangkan supaya pembangunannya menyentuh langsung ke masyarakat. Pembangunan intensif diperlukan dalam

rangka penyerapan tenaga kerjanya,” sambung Prakosa.

Yang terjadi saat ini, Yogyakarta termasuk baik dalam konteks pembangunan makro seperti pesatnya pertumbuhan melalui sektor pariwisata, namun hal itu tidak memiliki dampak pada daerah di sekitar Kota Yogyakarta seperti di Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul dan Sleman. Ini perlu menjadi perhatian agar pembangunan Yogyakarta juga diiringi dengan pemerataan di daerah sekitarnya.

Gunung Kidul adalah salah satu destinasi yang cukup baik di Provinsi

Yogyakarta. Namun spending para wisatawan seperti penginapan hotel lebih banyak dilakukan di Yogyakarta. Hal ini mengingat jumlah dan fasilitas hotel di Gunung Kidul kurang memadai. Sehingga, wisatawan yang datang ke Gunung Kidul lebih banyak menginap di Kota Yogyakarta. Menurut Prakosa hal tersebut menjadi anomali ditengah pesatnya pembangunan Yogyakarta namun ketimpangan tinggi dirasakan di daerah sekitar Kota Yogyakarta.

Meski demikian, legislator kelahiran Yogyakarta ini cukup bergembira atas pembangunan Bandara Kulon Progo

sebagai langkah untuk pemerataan pembangunan di Yogyakarta. Mengingat Bandara Adisutjipto saat ini memiliki kapasitas yang terbatas dan berlokasi dekat dengan Kota Yogyakarta.

Diharapkan pembangunan Bandara Kulon Progo ini mampu menjawab persoalan ketimpangan di Yogyakarta, karena lokasinya berada di daerah yang memiliki ketimpangan yang tinggi yakni di Kulon Progo. Melalui bandara ini, Kulon Progo juga diharapkan memiliki potensi ekonomi baru melalui tumbuhnya UMKM di sekitar bandara. ■ *(hs/sc)*

## Kinerja Ekonomi Bali Pasca Letusan Gunung Agung Tak Terganggu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno menilai kinerja ekonomi di wilayah yang terdampak langsung erupsi Gunung Agung di Bali bisa ditangani, dan sampai saat ini sudah tidak ada masalah. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Tim Komisi XI saat melakukan kunjungan kerja spesifik meninjau dampak perekonomian di Bali, khususnya ke wilayah yang terdampak langsung bencana erupsi Gunung Agung.

“Secara ekonomi, di sektor perbankan tidak ada kredit macet secara berlebihan, mungkin ada satu, dua, dan itu saya kira wajar. Dan itu bisa diselesaikan secara perbankan,” ujar Soepriyatno usai rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali dan sektor perbankan di Bali, Jumat (19/1).

Terdapat 8 Kecamatan di Kabupaten Karangasem yang terkena dampak langsung dari bencana erupsi Gunung Agung yaitu Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen dan Kecamatan Selat. Namun secara ekonomi, sampai saat ini bisa ditangani dengan baik, “Dampaknya juga tidak terlalu besar karena pemerintah juga tanggap membantu khususnya pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sesuai laporan bank umum dan BPR yang disampaikan pada 18 Desember 2017, data debitur dan kreditur yang



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno

terdampak erupsi Gunung Agung berasal dari 11 bank umum dan 36 BPR.

Terdapat 8 Kecamatan di Kabupaten Karangasem yang terkena dampak langsung dari bencana erupsi Gunung Agung yaitu Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen dan Kecamatan Selat. Namun secara ekonomi, sampai saat ini bisa ditangani dengan baik

Jumlah debitur dari 11 bank umum yang terkena dampak langsung erupsi Gunung Agung sebanyak 19.430 debitur dengan total baki debit Rp 1,09 triliun.

Sedangkan, jumlah debitur dari 36 BPR yang terkena dampak langsung erupsi Gunung Agung sebanyak 1.128 debitur dengan total baki debit Rp 148,9 miliar. Dari total kredit di Provinsi Bali, eksposur kredit yang terkena dampak erupsi Gunung Agung adalah sebesar 1,53 persen. ■ *(eka/sc)*



Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi

Foto: Nani/jk

“Kita tahu bersama Papua menjadi salah satu perhatian pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus). Namun, kejadian di Asmat cukup membuka mata dan telinga bahwa pelaksanaan Otsus belum dirasakan manfaat oleh masyarakat,” ungkapnya di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1).

## Otsus Papua Belum Dirasa Manfaatnya

Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi merasa ironis atas meninggalnya 61 anak di Kabupaten Asmat, Papua akibat gizi buruk.

Untuk itu, politisi Partai PPP itu meminta pemerintah pusat mendampingi pemerintah daerah terkait tata kelola pemerintahan dan pemanfaatan dana otonomi khusus.

“Kalau sudah otonomi daerah tentu saja bupati dan gubernur tidak bisa lepas tangan terhadap pelaksanaan,” jelasnya seraya mengatakan atas dasar ini, Komisi II akan mengundang pihak terkait, dalam hal ini yaitu pelaksana dana otonomi daerah.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II Ace Hasan Syadzily yang menyatakan keprihatinannya atas kasus yang terjadi di Papua, beberapa hari ini.

Ace menuturkan, Papua yang memiliki dana otonomi khusus cukup besar harusnya bisa mempergunakan dana yang diberikan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Papua.

“Dana itu dapat dipergunakan dan didayagunakan dengan tepat sasaran. Dengan dana yang besar permasalahan gizi buruk seharusnya tidak teridentifikasi danantisipasi dengan dana Otsus,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya menghimbau seluruh stakeholder agar dapat memanfaatkan Dana Otsus dengan tepat sasaran dan tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Atas dana Otsus yang terbilang besar ini, pemda harus mengikuti fungsi atau program yang disusun secara bersama untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. ■(nm/s)

## Jasindo dan RS Mitranya Harus Evaluasi Obat Tanggungan

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan bahwa Jasindo sudah tepat memilih Rumah Sakit Hermina Palembang sebagai mitra kerjanya. Namun, dari hasil tinjauan ke RS itu, BURT mencatat ada kerancuan terhadap obat yang ditanggung dan tidak ditanggung asuransi.

“Ada obat yang mungkin semacam vitamin atau bersifat kosmetika yang diresepkan dokter, yang ternyata tidak di-cover asuransi, sehingga masih harus ada biaya tambahan,” ungkap Agung saat berdialog dengan Direktur dan Staf RS Hermina Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (23/1). Kunjungan ini juga didampingi PT. Jasindo sebagai provider asuransi DPR RI.

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat itu menekankan bahwa harus ada kerja sama dan sinkronisasi peraturan yang lebih tepat antara Jasindo dan rumah sakit provider.

“Kita minta kepada Jasindo untuk



Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso meninjau loby utama RS Hermina Palembang

Foto: Nani/jk

mengevaluasi kembali kerjasamanya dengan rumah sakit mitranya, sehingga apabila ada obat yang memang diresepkan dokter dapat sepenuhnya *covered*,” ujar Agung.

Menanggapi hal itu, Liaison Officer PT Jasindo, Alex P. Suardi menjelaskan bahwa memang terdapat kategori obat yang telah sesuai peraturan Menteri Kesehatan dan kategori lainnya

yang tertera dalam daftar obat yang ditanggung.

“Mengenai obat-obatan yang dikeluarkan rumah sakit yang kemudian menimbulkan keluhan pada peserta, kami menyarankan kepada Rumah Sakit seharusnya tidak mengeluarkan obat-obatan yang tidak ada dalam daftar,” jelas Alex.

Dia berharap di kemudian hari,

pihaknya dan Rumah Sakit lebih kooperatif dan menjalin komunikasi, sehingga tidak mengharuskan memakai obat di luar tanggungan.

“Seharusnya rumah sakit tidak memberikan obat-obatan yang tidak terdaftar, karena pasti ada obat yang ada dalam daftar untuk pengobatan pasien sesuai dengan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan,” pungkas Alex. ■(ran/sf)

## Komisi IX Dukung Relokasi Warga Kabupaten Asmat ke Kota

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendukung tawaran Presiden Joko Widodo untuk merelokasi sejumlah penduduk di Agats, Kabupaten Asmat, Papua yang terkena penyakit campak dan gizi buruk ke kota.

“Kalau setelah diobati kembali ke lokasi yang sama, dengan kondisi jarak yang jauh, medan yang berat dan fasilitas yang kurang, kemungkinan itu akan terjadi lagi. Karena faktor kemiskinan, faktor edukasi dan yang lainnya. Oleh karena itu perlu direlokasi, nah Presiden menyampaikan hal tersebut, saya mendukung,” papar Dede di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/1).

Penyakit cacar dan gizi buruk yang menimpa anak-anak di Kabupaten Asmat, Papua, membuat Presiden RI Joko Widodo membuat keputusan untuk menekan wabah penyakit tersebut. Persiapan relokasi warga Kabupaten Asmat ke kota memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Jarak yang jauh dan kontur daerah yang berbeda dari daerah lain, menjadi salah satu tugas berat yang harus dipikirkan pemerintah pusat.

Dede juga menyarankan, agar rencana relokasi tersebut disertai dengan pembinaan hidup mandiri, diberikan modal oleh pemerintah agar bisa memenuhi kebutuhan hidup ke depannya.

“Tapi relokasi itu konsepnya sebagai transmigrasi, artinya dia ditempatkan dengan sarana dekat dengan fasilitas kesehatan pendidikan dan sebagainya.

Persiapan relokasi warga Kabupaten Asmat ke kota memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Jarak yang jauh dan kontur daerah yang berbeda dari daerah lain, menjadi salah satu tugas berat yang harus dipikirkan pemerintah pusat.

Tetapi juga harus diberikan penghidupan, biaya hidup, setahun dua tahun pertama untuk bercocok tanam, peternakan dan sebagainya,” jelasnya.

Selain itu, Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini beranggapan, bahwa perlunya koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat mencegah wabah penyakit ini terjadi kembali. “Tentu koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Daerah harus lebih dini. Pemantauan dan *early warning system* harus bisa didapat dari jauh-jauh hari sebelum kejadian. Jangan

hanya menjadi pemadam kebakaran saat terjadi,” ujar Dede.

Lalu, lanjut Dede, pentingnya kerjasama antar Kementerian, karena bukan hanya Menteri Kesehatan yang harus menangani masalah tersebut. Tetapi di sisi lain ada masalah lingkungan, edukasi, kemiskinan, serta infrastruktur jalan yang sulit dilalui. ■(ka/sf)



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi

Foto: Asmat/jk



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Ketua MPR, Menhub dan Ketua Komisi V DPR Fery Djemy Francis menyalakan lilin Natal di Pustakaloka, Gedung DPR.

## Perbedaan Pilihan Politik Diimbau Tak Ganggu Persaudaraan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau semua elemen masyarakat menjadikan pesta demokrasi di tahun politik 2018 dan 2019, sebagai pesta rakyat yang menggembirakan dan menyenangkan. Perbedaan sikap dan pilihan politik, janganlah mengganggu hubungan persaudaraan dan kebersamaan sebagai bangsa.



Foto: Opi/jk

“Mari kita gaungkan kembali semangat cinta damai yang penuh persaudaraan. Mari kita letakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Hanya dengan itu, kita akan mampu membangun Indonesia yang maju, adil, makmur, sejahtera lahir dan batin,” ujar Bamsuet, panggilan akrabnya, pada acara Perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 MPR,

DPR dan DPD RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1) malam.

Hadir dalam acara tersebut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, Menteri Desa dan PDT Eko Putro Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya, Romo Magniz Suseno, Duta Besar negara sahabat, serta para undangan lainnya seperti dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), dan pegawai dan karyawan di lingkungan MPR, DPR, dan DPD RI.

Lebih jauh Bamsuet menjelaskan, kedamaian yang didambakan tentu tidak ditujukan untuk damai individual semata, tetapi sekaligus damai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi Bamsuet, keberagaman Bangsa Indonesia dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri sebagai tanda bahwa Tuhan mengasihi bangsa dan negara Indonesia.

“Dengan kata lain, mengingkari kebhinekaan sama dengan mengingkari jati diri Bangsa Indonesia” tutur politisi Partai Golkar itu.

Bamsuet juga mengingatkan, saat ini masyarakat di Kabupaten Asmat, Papua sedang mengalami musibah gizi buruk dan penyakit campak. Alangkah indahnya, jika semangat cinta kasih yang menjadi pesan Natal diwujudkan dengan memberikan rasa empati, dukungan dan bantuan kepada warga Papua.

“Saya pribadi menyumbangkan gaji sebagai Ketua DPR mulai bulan ini hingga akhir masa jabatan saya untuk mengentaskan masalah gizi buruk di Papua. Semoga kasih Tuhan yang selama ini telah kita alami dan nikmati terus mendorong kita untuk semakin giat berbuat kebajikan bagi sesama,” tutup Bamsuet.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Perayaan Natal Bersama sekaligus Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis meminta agar nilai-nilai kebersamaan dan kebhinekaan selalu

---

Kedamaian yang didambakan tentu tidak ditujukan untuk damai individual semata, tetapi sekaligus damai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi Bamsuet, keberagaman Bangsa Indonesia dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri sebagai tanda bahwa Tuhan mengasihi bangsa dan negara Indonesia.

---

dijunjung tinggi khususnya di tahun ini, dimana akan diselenggarakan pesta demokrasi serentak di 171 daerah.

Fary menekankan, agar seluruh lapisan masyarakat tetap menjaga perdamaian dan menciptakan persatuan. Indonesia adalah satu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga segala sesuatu mengenai keberagaman tidak perlu lagi dipermasalahkan.

“Kita boleh berbeda dalam pilihan politik, tetapi kita mesti saling berdamai, persaudaraan dan persatuan bangsa nilainya jauh lebih besar daripada kepentingan politik partisan,” ujarnya.

Perayaan Natal berlangsung khidmat dan penuh kedamaian. Pesan-pesan Natal disampaikan Romo Magniz Suseno yang menekankan kesempurnaan Pancasila dalam berbangsa dan bernegara.

Selain itu, Anggota DPR juga turut terlibat dalam memberikan pujian dengan judul ‘Hidup ini adalah Kesempatan’. Di akhir acara, Panitia memberikan tali kasih kepada sejumlah panti werdha, panti asuhan, organisasi penyandang disabilitas, yayasan pendidikan Kristen hingga purnabakti PNS Setjen MPR dan DPR RI. ■(ann/sj)



Ketua DPR Bambang Soesatyo menerima kunjungan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) terkait rencana unit kerjanya akan disetarakan setingkat kementerian di Gedung DPR, Kamis (25/1). *Foto: Andri*



Wakil Ketua DPR Korekku Taufik Kurniawan menerima audiensi Perangkat Desa di Gedung DPR, Kamis (25/1). *Foto: Jaka*



Deputi Administrasi, Mardian Umar membuka acara pelatihan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN) di Lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR, Kamis (26/1). *Foto: Oji*